



# JUMLAH KEDUA RENCANA KERJA

KA

Jl. Sulman, Gedung Pa, Widyadarmas Pro  
email : [inspektorat@kult.go.id](mailto:inspektorat@kult.go.id)

**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 55 / K / 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2018 telah ditetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2018;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Perubahan Kedua Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. Pendahuluan;
  - b. Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
  - c. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - d. Penutup.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 3 Agustus 2018



Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo  
Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo  
Kab. Dati. Bina, Dokumentasi Dan  
Sertifikasi Produk Hukum

KURNIAWAN EKA NUGRAHA, M.H.  
NIP. 19741217 193603 1 001



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kulon Progo  
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-ags-

ip

## DAFTAR ISI

### Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2018

	Halaman
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	2
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II</b> <b>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II</b> .....	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2018 ..	4
2.2 Analisis Kinerja OPD .....	8
2.3 Isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD .....	9
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja OPD .....	13
<b>BAB III</b> TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	17
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi .....	17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	18
3.3 Program dan Kegiatan .....	19
<b>BAB VII</b> PENUTUP .....	24

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dengan terbitnya Keputusan Bupati Kulon Progo nomor 395/A/2018 tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018, maka Organisasi perangkat daerah perlu segera melakukan penyesuaian dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diawali dengan menyusun Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018.

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam rangka penyusunan Perubahan Kedua Rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo ;
10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
13. Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 51 Tahun 2018 ;
14. Keputusan Bupati Kulon Progo nomor 395/A/2018 tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Kedua Rencana Kerja SKPD adalah menindaklanjuti terbitnya Keputusan Bupati Kulon Progo nomor 395/A/2018 tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018. Rencana Kerja merupakan salah satu bagian dari sistem perencanaan pembangunan di Daerah yang secara terintegrasi, bersama-sama dengan SKPD yang lain dalam menyusun strategi jangka pendek (tahunan) untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, serta sebagai tolak ukur pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama organisasi yang akan dicapai setiap tahunnya guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan Inspektorat Kabupaten Kulon Progo.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Kedua Rencana Kerja SKPD adalah sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran SKPD yang berupa perubahan rencana program dan kegiatan tahunan SKPD dalam rangka mencapai visi dan misi SKPD.



## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II EVALUASI HASIL RENJA TRIWULAN II TAHUN BERJALAN**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan triwulan II tahun 2018.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja/Renstra OPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

### **BAB IV PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI HASIL RENJA TRIWULAN II TAHUN BERJALAN**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2018**

Pada Tahun 2018, Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, melaksanakan 4 program dengan 18 kegiatan dan kebutuhan dana yang dibutuhkan dengan sumber dari APBD Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 1.813.722.950,00.

Untuk capaian keuangan dari anggaran sebesar Rp. 1.813.722.950,00,00, direalisasikan sebesar Rp. 553.824.530,00 sebesar 30,54 %.

Capaian Kinerja Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen renja tahun 2018 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018. Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam renja tahun 2018, sedangkan jumlah anggaran (Rp.) untuk setiap program sesuai dengan DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018. Berikut adalah data capaian program, kegiatan, Perangkat Daerah dan pagu belanja sampai dengan triwulan II tahun 2018 :

No	Perubahan Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kendaraan roda 2	11 unit				Kendaraan roda 2	11 unit		
			AC	2 unit				AC	2 unit		
			Mesin ketik	4 unit				Mesin ketik	4 unit		
			Komputer	4 unit				Komputer	4 unit		
			Laptop	2 unit				Laptop	2 unit		
			Printer	3 unit				Printer	3 unit		
3	Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit	Inspektorat Daerah	Penetapan Penilaian Angka Kredit	2 semester	19.935.000	Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit	Inspektorat Daerah	Penetapan Penilaian Angka Kredit	2 semester	19.935.000	Tetap
4	Pendidikan dan pelatihan non formal	Inspektorat Daerah	Teririmnya peserta diklat/bimtek /kursus	6 orang	19.800.000	Pendidikan dan pelatihan non formal	Inspektorat Daerah	Teririmnya peserta diklat/bimtek /kursus	6 orang	19.800.000	Tetap
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal</b>		<b>Capaian peningkatan sistem pengawasan internal dan pengawasan desa</b>	<b>62,44 %</b>	<b>1.270.026.400</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal</b>		<b>Capaian peningkatan sistem pengawasan internal dan pengawasan desa</b>	<b>71,03 %</b>	<b>1.268.240.400</b>	
1	Peningkatan Kapabilitas APIP (Internal Audit Capability Models)	Inspektorat Daerah	Terwujudnya kapabilitas APIP level 3	3 (level)	89.626.800	Peningkatan Kapabilitas APIP (Internal Audit Capability Models)	Inspektorat Daerah	Terwujudnya kapabilitas APIP level 3	3 (level)	89.626.800	Tetap
			Terwujudnya peningkatan pengelolaan data pengawasan	12 bulan				Terwujudnya peningkatan pengelolaan data pengawasan	12 bulan		
			Terselenggaranya Program Peningkatan Pelatihan Mandiri	12 bulan				Terselenggaranya Program Peningkatan Pelatihan Mandiri	12 bulan		
2	Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Inspektorat Daerah	Laporan hasil review dokumen laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah	2 jenis	108.534.600	Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Inspektorat Daerah	Laporan hasil review dokumen laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah	2 jenis	108.534.600	Tetap
			Reviu RKA SKPD	42 SKPD				Reviu RKA SKPD	42 SKPD		
			Laporan Hasil Pelaksanaan PMPRB	1 dokumen				Laporan Hasil Pelaksanaan PMPRB	1 dokumen		
3	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Inspektorat Daerah	Laporan hasil pemeriksaan reguler	40 SKPD	172.740.850	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Inspektorat Daerah	Laporan hasil pemeriksaan reguler	40 SKPD	172.735.850	Penyesuaian kebutuhan anggaran perjalanan dinas
4	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan khusus/kasus	Inspektorat Daerah	Laporan Pemeriksaan khusus/kasus	5 dokumen	64.921.300	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan khusus/kasus	Inspektorat Daerah	Laporan Pemeriksaan khusus/kasus	5 dokumen	83.221.300	Penyesuaian anggaran Tim Pemeriksa terkait penambahan jumlah Obyek Pemeriksaan
			Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	5 dokumen				Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	10 dokumen		
5	Tindak lanjut hasil pemeriksaan	Inspektorat Daerah	Penyelenggaraan Gelar Pengawasan Daerah	1 kali	83.982.050	Tindak lanjut hasil pemeriksaan	Inspektorat Daerah	Penyelenggaraan Gelar Pengawasan Daerah	1 kali	83.982.050	Tetap
			Rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	2 jenis				Rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	2 jenis		
6	Pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Inspektorat Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa	87 desa	396.378.300	Pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Inspektorat Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa	87 desa	396.332.300	Penyesuaian kebutuhan anggaran

**Tabel II.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan**  
**Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2018**  
**Kabupaten Kulon Progo**

Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2018		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s.d Triwulan II Tahun 2018		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Triwulan II Tahun 2018 (%)	
			4		5		6		7		8		9		10=(5+9)		11=(10/4)%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
<b>4.02.4.02.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>2.314.807.350</b>	<b>60%</b>	<b>171.806.096</b>	<b>20%</b>	<b>178.395.000 0</b>	<b>5 %</b>	<b>25.189.156</b>	<b>10</b>	<b>40.900.891</b>	<b>10 %</b>	<b>66.177.847</b>	<b>10</b>	<b>228.073.943,00</b>	<b>10</b>	<b>10,28</b>
4.02.4.02.01.01.01.26	Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran	Pembayaran upah penjaga malam	60	251.428.350	0	42.481.000	12	42.993.500	3	6.561.500	2	10.262.800	5	16.824.300	5	59.305.300,00	6,33	23,59
		Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan)	60		0		12		0		0		0		0		-	
4.02.4.02.01.01.01.27	Penyediaan jasa keuangan	Honorarium pengelola keuangan dan barang	60	1.511.941.500	0	24.823.600	12	25.449.200	3	6.160.000	2	4.100.000	5	10.250.000	5	35.073.600,00	6,33	2,32
4.02.4.02.01.01.01.28	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah.	60	551.437.500	0	104.591.496	12	109.952.300	3	12.477.656	2	26.625.891	5	39.103.547	5	143.695.043,00	6,33	26,06
<b>4.02.4.02.01.01.11</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</b>	<b>Capaian intermediasi sarana dan prasarana kondisi baik</b>	<b>100</b>	<b>2.138.110.000</b>	<b>100</b>	<b>468.759.251</b>	<b>20</b>	<b>390.527.250</b>	<b>5</b>	<b>63.280.331</b>	<b>10</b>	<b>40.325.015</b>	<b>10</b>	<b>112.085.346</b>	<b>10</b>	<b>560.364.997,00</b>	<b>10,00</b>	<b>28,62</b>
4.02.4.02.01.01.11.01	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Tersedianya AC (unit)	4	329.788.500	0	171.407.500	4	80.663.500	4	24.430.000	0	0	4	24.430.000	4	195.837.500,00	100,00	59,38
		Peralatan personal komputer: komputer PC, printer, UPS Laptop (unit)	11		0		11		0		0		0		0		-	
4.02.4.02.01.01.11.02	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Pembayaran air, listrik dan telepon (bulan)	12	1.592.810.500	0	239.701.251	12	270.128.750	3	35.880.331	2	44.279.015	5	80.159.346	5	319.660.597,00	41,67	20,08
		Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik, alat dan bahan kebersihan (bulan)	12		0		12		3		2		5		5		41,67	
		Terpeliharanya gedung dan halaman kendaraan roda 4 (4 unit), kendaraan roda 2 (11 unit), AC (2 unit), mesin ketik (4 unit), komputer (4 unit), laptop (2 unit), printer (3 unit) (bulan)	12		0		12		0		0		0		0		-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2018		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s.d Triwulan II Tahun 2018		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Triwulan II Tahun 2018 (%)	
			4		5		6		7		8		9		10=(5+9)		11=(10/4)%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4.02.4.02.01.01.13.01	Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit	Penetapan Penilaian Angka Kredit (semester)	2	105.711.000	0	21.585.500	2	19.935.000	1	2.970.000	0	5.046.000	1	8.016.000	1	29.601.500,00	50,00	28,00
4.02.4.02.01.01.13.03	Pendidikan dan pelatihan non formal	Terkirimnya peserta diklat/bimtek/kursus (orang)	6	110.800.000	0	24.065.000	6	19.800.000	0	0	0	0	0	0	0	24.065.000,00	-	21,72
<b>4.02.4.02.01.01.12</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja</b>	<b>100</b>	<b>62.320.800</b>	<b>100</b>	<b>18.352.400</b>	<b>20</b>	<b>6.909.300</b>	<b>5</b>	<b>510.250</b>	<b>10</b>	<b>1.403.100</b>	<b>10</b>	<b>1.913.350</b>	<b>10</b>	<b>20.285.750,00</b>	<b>10,00</b>	<b>32,52</b>
4.02.4.02.01.01.12.01	Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	Dokumen Renja dan Renstra SKPD	3	31.504.000	0	13.986.500	3	2.474.000	2	152.000	0	111.900	2	263.900	2	14.250.400,00	66,67	45,23
4.02.4.02.01.01.12.02	Penyusunan laporan keuangan	Laporan keuangan semester dan tahunan	2	14.507.000	0	2.301.900	2	2.916.900	0	368.250	0	276.200	0	634.450	0	2.936.350,00	-	20,24
4.02.4.02.01.01.12.03	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja LAKIP, laporan tahunan dan profil kinerja SKPD	21	16.309.000	0	2.064.000	21	3.518.400	6	0	2	1.015.000	8	1.015.000	8	3.079.000,00	38,10	18,88
<b>4.02.4.02.01.01.57</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal</b>	<b>Capaian peningkatan sistem pengawasan internal dan pengawasan desa (%)</b>	<b>78,32</b>	<b>6.645.680.800</b>	<b>68,09</b>	<b>1.221.581.986</b>	<b>71,83</b>	<b>1.285.891.480</b>	<b>28,12</b>	<b>212.386.400</b>	<b>64,36</b>	<b>216.810.203</b>	<b>64,36</b>	<b>429.176.583</b>	<b>64,36</b>	<b>1.658.678.589,00</b>	<b>82,18</b>	<b>24,84</b>
4.02.4.02.01.01.57.01	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Laporan hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa (desa)	105	2.083.592.500	0	305.214.550	105	396.378.300	23	56.015.000	16	91.939.503	39	147.954.503	39	453.169.053,00	37,14	21,75
4.02.4.02.01.01.57.05	Tindak lanjut hasil pemeriksaan	Penyelenggaraan Gelar Pengawasan Daerah: (kali)	1	436.438.750	0	75.595.911	1	83.982.050	0	8.195.500	0	9.415.700	0	17.611.200	0	93.207.111,00	-	21,36
		Rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan (jenis)	2		0		2		0,48		0,32		0,8		0,8			40,00
4.02.4.02.01.01.57.13	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan khusus / kasus	Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, khusus/kasus (dokumen)	10	348.286.975	0	110.294.580	10	64.921.300	7	18.055.500	0	12.493.900	7	30.549.100	7	140.843.600,00	70,00	40,32
4.02.4.02.01.01.57.14	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Laporan hasil pemeriksaan reguler (SKPD)	40	1.012.283.600	0	170.252.800	40	172.740.850	21	82.762.750	0	1.074.750	21	83.937.500	21	254.080.300,00	52,50	25,10
4.02.4.02.01.01.57.16	Peningkatan Kapabilitas APIP (Internal Audit Capability Models)	Terselenggaranya Program Peningkatan Pelatihan Mandiri (kali)	5	368.625.800	0	118.647.125	5	88.626.800	3	977.750	0	17.697.250	3	18.675.000	3	137.322.125,00	60,00	37,25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2018		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s.d Triwulan II Tahun 2018		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Triwulan II Tahun 2018 (%)	
			4		5		6		7		8		9		10=(5+9)		11=(10/4)%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Terwujudnya peningkatan pengelolaan data pengawasan (bulan)	12		0		12		0		0		0		0		-	
		Terwujudnya kapabilitas APIP (level)	3		0		3		0		0		0		0		-	
4.02.4.02.01.01.57.18	Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan PMPRB (dokumen)	1	532.891.200	0	83.094.900	1	108.534.600	0	31.935.000	0	6.281.000	0	38.216.000	0	121.310.900,00	-	22,76
		Review RKA SKPD (SKPD)	42		0		42		0		0		0		0		-	
		Laporan hasil review dokumen laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah (dokumen)	43		0		43		0		0		0		0		-	
4.02.4.02.01.01.57.19	Pendampingan Pengelolaan Aset Daerah	Laporan hasil stock opname dan cash opname (SKPD)	42	248.082.400	0	67.556.500	42	37.600.800	0	0	0	0	0	0	0	67.556.500,00	-	27,23
4.02.4.02.01.01.57.20	Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Evaluasi SPIP (SKPD)	20	1.614.478.775	0	290.845.700	20	282.106.700	0	14.424.900	0	77.908.400	0	92.333.300	0	383.179.000,00	-	23,73
		Review AKIP Pemkab dan evaluasi AKIP SKPD (SKPD)	42		0		42		0		0		0		0		-	
		Meningkatnya tingkat kepatuhan dalam penyampaian LHKASN (SKPD)	42		0		42		0		0		0		0		-	
		Terwujudnya penetapan dan pendampingan SKPD percontohan zona integritas (SKPD)	4		0		4		0		0		0		0		-	
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan RAD PPK (dokumen)	1		0		1		0		0		0		0		-	
		Laporan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) (dokumen)	4		0		4		0		0		0		0		-	
		Operasi Tangkap Tangan Saber Pungli (kali)	10		0		10		0		0		0		0		-	

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

**Tabel II.2**  
**Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah**  
**Kabupaten Kulon Progo**

NO	Indikator	Satuan	Formula penghitungan	Target	Realisasi Capaian		Catatan Analisa
				Renja OPD	Triwulan I	Triwulan II	
(1)	(2)	(3)	(4)	Tahun 2018 (tm n)	(9)	(10)	(13)
1	Cakupan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengawasan desa	%	$((\text{Jumlah obrik yang tidak ada temuan} / \text{Jumlah obrik} \times 100\%) + (\text{Jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti tepat waktu} / \text{Jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan} \times 100\%) + (\text{Jumlah SKPD dan Desa yang diperiksa} / \text{Jumlah SKPD dan Desa yang seharusnya diperiksa} \times 100\%) + (\text{Jumlah SKPD yang bernilai minimal B} / \text{Jumlah SKPD} \times 100\%)) / 4$	62,44	46,53	73,08	Berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan triwulan II tahun 2018

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa capaian tersebut, diperoleh dari hasil pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 sampai dengan bulan Juni 2018.

### **2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Dengan berkembangnya harapan masyarakat dunia terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*), bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Semakin kritisnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan atas diberlakukannya transparansi sebagai implemetasi dari tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum.
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang terus diupayakan dengan cara menjaga kualitas sistem pengendalian internal sebagai tuntutan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
3. Upaya pendampingan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai implemetasi dari Rencana aksi daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terkait dengan adanya Dana Desa dari Pemerintah Pusat dalam jumlah yang besar, menuntut adanya pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

Selain itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan menemukan beberapa permasalahan diantaranya :

- 1). Kemampuan APBD yang terbatas sehingga alokasi anggaran untuk pengawasan kurang sesuai dengan cakupan obyek pemeriksaan (obyek pemeriksaan), hanya sebagian kecil dari jumlah seluruh obyek pemeriksaan.

Kendala tersebut diatas kemungkinan akan berpengaruh terhadap kinerja pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo karena fungsi pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan beban kerja pengawasan (jumlah obyek pemeriksaan). Disamping itu, fungsi pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, sehingga apabila salah



satu fungsi manajemen tidak dapat dilaksanakan secara optimal maka besar kemungkinan akan berpengaruh terhadap efektivitas organisasi/SKPD.

- 2). Jumlah kendaraan operasional yang dibutuhkan untuk kegiatan ke lapangan dalam rangka pemeriksaan belum memadai.

Jumlah kendaraan roda 4 ada 5 unit, dengan keadaan 2 unit dalam kondisi rusak. Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk satu kali penugasan terdapat 7 tim pemeriksaan, sehingga masih kekurangan kendaraan operasional roda 4 sebanyak 4 unit. Permasalahan ini sementara diatasi dengan menggunakan kendaraan pribadi.

- 3). Kesenjangan antara jumlah aparat pengawasan terutama jumlah Pejabat Fungsional Auditor (PFA) yaitu sebanyak 24 orang dibandingkan dengan jumlah obyek pemeriksaan yang diampu oleh Inspektorat Daerah.

Menurut hasil analisis jabatan, jumlah kebutuhan JFA pada Inspektorat Daerah setelah disesuaikan dengan beban kerja, adalah sebanyak 57 orang. Saat ini jumlah JFA sebanyak 24 orang sehingga masih kurang 33 orang. Permasalahan ini untuk sementara diatasi dengan mengoptimalkan kinerja JFA yang tersedia dan melibatkan personil non JFA yang sudah memiliki sertifikat kompetensi auditor. Di samping itu, dengan keterbatasan jumlah JFA tersebut, maka dalam penyusunan perencanaan, jumlah obyek pemeriksaan yang dapat diperiksa menyesuaikan dengan jumlah anggaran dan SDM yang ada.

- 4). Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan 100 % oleh obyek pemeriksaan, untuk itu perlu upaya peningkatan koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan pihak terkait dalam rangka penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan internal maupun eksternal.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja/Renstra SKPD**

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah telah terdapat rumusan program dan kegiatan di Inspektorat Daerah yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah. Akan tetapi dalam perkembangannya, setelah diadakan telaah terkait dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, maupun beberapa rincian kegiatan yang memerlukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan, maka ada beberapa perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Hasil telaahan terhadap rancangan awal renja ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel II.3**  
**Review terhadap Perubahan Kedua Renja Tahun 2018**  
**Kabupaten Kulon Progo**

No	Perubahan Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>20 %</b>	<b>178.395.000</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>20 %</b>	<b>178.395.000</b>	
1	Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran	Inspektorat Daerah	Pembayaran upah penjaga malam	2 orang	42.993.500	Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran	Inspektorat Daerah	Pembayaran upah penjaga malam	2 orang	42.993.500	Tetap
			Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan)	12 Bulan				Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan)	12 Bulan		
2	Penyediaan jasa keuangan	Inspektorat Daerah	Honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	25.449.200	Penyediaan jasa keuangan	Inspektorat Daerah	Honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	25.449.200	Tetap
3	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	Inspektorat Daerah	Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah.	12 bulan	109.952.300	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	Inspektorat Daerah	Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah.	12 bulan	109.952.300	Tetap
<b>II</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja</b>		<b>Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja</b>	<b>20 %</b>	<b>8.909.380</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja</b>		<b>Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja</b>	<b>20 %</b>	<b>8.909.380</b>	
1	Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	Inspektorat Daerah	Dokumen Renja dan Renstra SKPD	2 dokumen	2.474.000	Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	Inspektorat Daerah	Dokumen Renja dan Renstra SKPD	2 dokumen	2.474.000	Tetap
2	Penyusunan laporan keuangan	Inspektorat Daerah	Laporan keuangan semester dan tahunan	2 dokumen	2.916.900	Penyusunan laporan keuangan	Inspektorat Daerah	Laporan keuangan semester dan tahunan	2 dokumen	2.916.900	Tetap
3	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Inspektorat Daerah	Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan dan triwulanan LKJIP, laporan tahunan, laporan SPI dan profil kinerja SKPD	21 dokumen	3.518.400	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Inspektorat Daerah	Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan dan triwulanan LKJIP, laporan tahunan, laporan SPI dan profil kinerja SKPD	21 dokumen	3.518.400	Tetap
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</b>		<b>Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik</b>	<b>20 %</b>	<b>390.527.250</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</b>		<b>Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik</b>	<b>20 %</b>	<b>500.284.250</b>	
1	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Inspektorat Daerah	Tersedianya komputer PC	3 unit	80.663.500	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Inspektorat Daerah	Tersedianya komputer PC	3 unit	190.420.500	Penyesuaian kebutuhan sarana prasarana kerja
			Tersedianya printer	3 unit				Tersedianya printer	3 unit		
			Tersedianya UPS	3 unit				Tersedianya UPS	3 unit		
			Tersedianya laptop	2 unit				Tersedianya laptop	2 unit		
			Tersedianya mebelair	68 unit				Tersedianya mebelair	68 unit		
2	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Inspektorat Daerah	Terpeliharanya kendaraan roda 4	4 unit	270.128.750	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Inspektorat Daerah	Terpeliharanya kendaraan roda 4	4 unit	270.128.750	Tetap
			Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik, alat dan bahan kebersihan	12 bulan				Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik, alat dan bahan kebersihan	12 bulan		
			Pembayaran air, listrik dan telepon	12 bulan				Pembayaran air, listrik dan telepon	12 bulan		

No	Perubahan Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Laporan hasil pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa	18 dokumen				Laporan hasil pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa	18 dokumen		perjalanan dinas
7	Pendampingan Pengelolaan Aset Daerah	Inspektorat Daerah	Laporan Hasil Stock opname dan cash opname	42 SKPD	37.600.800	Pendampingan Pengelolaan Aset Daerah	Inspektorat Daerah	Laporan Hasil Stock opname dan cash opname	42 SKPD	37.600.800	Tetap
8	Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Laporan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	4 dokumen	282.106.700	Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Laporan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	4 dokumen	297.206.700	Penyesuaian Jumlah anggota Tim dalam pelaksanaan Rencana Aksi pencegahan Korupsi Terintegrasi
			Tersedianya Laporan Pelaksanaan RAD PPK	1 dokumen				Tersedianya Laporan Pelaksanaan RAD PPK	1 dokumen		
			Terwujudnya penetapan dan pendampingan SKPD percontohan zona integritas	4 SKPD				Terwujudnya penetapan dan pendampingan SKPD percontohan zona integritas	4 SKPD		
			Meningkatnya tingkat kepatuhan dalam penyampaian LHKASN	42 SKPD				Meningkatnya tingkat kepatuhan dalam penyampaian LHKASN	42 SKPD		
			Review AKIP Pemkab dan evaluasi AKIP SKPD	42 SKPD				Review AKIP Pemkab dan evaluasi AKIP SKPD	42 SKPD		
			Evaluasi SFIP	20 SKPD				Evaluasi SFIP	20 SKPD		
			Operasi Tangkap Tangan Saber Pungli	10 kali				Operasi Tangkap Tangan Saber Pungli	10 kali		

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi.

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota. Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern.

Maksud pengawasan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Hal itu sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*)

Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat dewasa ini, maka rumusan pengawasan yang sederhana itu tidaklah cukup dan masyarakat mengharapkan lebih dari sekedar memperbaiki atau mengoreksi kesalahan untuk perbaikan dimasa datang, melainkan terhadap kesalahan, kekeliruan apalagi penyelewengan yang telah terjadi tidak hanya sekedar dikoreksi dan diperbaiki akan tetapi harus diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah. Kesalahan harus ditebus dengan sanksi/hukuman, dan bila memenuhi unsur tindak pidana harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat efek jera bagi pelaku dan orang lain berpikir seribu kali untuk melakukan hal yang sama, sehingga praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi berkurang dan akhirnya hilang. Hal seperti itulah yang menjadi cita-cita dan semangat bangsa Indonesia yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Guna mewujudkan keinginan tersebut diperlukan langkah-langkah pragmatis yang lebih realistis dan sistematis dalam penempatan sumberdaya manusia pada lembaga pengawas daerah, mulai dari pimpinannya sampai kepada staf/pejabat yang membantu dan memberikan dukungan untuk kesuksesan seorang pimpinan lembaga pengawas tersebut. Seorang pimpinan organisasi akan memberikan pewarnaan terhadap organisasi tersebut, dan ia akan berfungsi sebagai katalisator dalam organisasinya, sehingga untuk itu ia harus punya integritas, moralitas dan kapabilitas serta kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja OPD.

Dari telaah tersebut di atas, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan fungsional
2. Terwujudnya peningkatan tindak lanjut penyelesaian temuan permasalahan
3. Terwujudnya peningkatan pelayanan konsultasi dan atau pendampingan
4. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM APIP
6. Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pengawasan daerah
7. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja serta keuangan.

Adapun sasaran sebagai penjabaran dari tujuan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat : spesifik, terinci, dapat diukur serta dapat dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus serta terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
2. Meningkatnya sistem manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan) dan akuntabilitas serta kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan
3. Terciptanya aparatur pengawasan yang profesional, mandiri dan berkualitas baik *skill*, *knowledge* maupun *attitude*
4. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan
5. Terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang memadai

Adapun Nilai-Nilai Organisasi yang akan dijadikan budaya organisasi pada Inspektorat Daerah adalah :

1. Integritas
2. Profesionalisme
3. Obyektif
4. Independent
5. Perbaikan terus-menerus

### **3.3. Program dan Kegiatan.**

Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Kedua Renja Tahun 2018 terhadap rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2018 disusun berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut :

1. Pergeseran antar rekening belanja
2. Penambahan/pengurangan sasaran kegiatan
3. Penyesuaian dengan pendapatan dana transfer
4. Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan
5. Tambahan karena kebutuhan mendesak berkaitan dengan kerjasama pihak ketiga;
6. Penyesuaian perubahan indikator kinerja tujuan, sasaran dan indikator kinerja program
7. Efisiensi karena penyesuaian dengan indikator kinerja dan standar belanja.

Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Kedua Renja Tahun 2018 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan urusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), secara rinci disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.1  
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018

Nama SKPD : Inspektorat Daerah

Sumberdana : APBD Kabupaten

Jumlah pagu : 1.956.828.950

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SESUDAH PERUBAHAN				BERTAMBAH BERKURANG	KETERANGAN
		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	LOKASI	RKPD	APBD	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF		
4.02.4.02.01.01.01-P	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	20 %		178.395,000	178.395,000	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	20 %		178.395,000	0	
4.02.4.02.01.01.01.26-P	Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran	Pembayaran upah penjaga malam	2 orang	Lingkup Kabupaten	42.993,500	42.993,500	Pembayaran upah penjaga malam	2 orang	Lingkup Kabupaten	42.993,500	0	Tetap
		Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan)	12 bulan				Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan)	12 bulan				
4.02.4.02.01.01.01.27-P	Penyediaan jasa keuangan	Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (9 orang)	12 bulan	Lingkup Kabupaten	25.449,200	25.449,200	Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (9 orang)	12 bulan	Lingkup Kabupaten	25.449,200	0	Tetap
4.02.4.02.01.01.01.28-P	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	Rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	Lingkup Kabupaten	109.952,300	109.952,300	Rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	Lingkup Kabupaten	109.952,300	0	Tetap
4.02.4.02.01.01.12-P	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja	20 %		8.909,300	8.909,300	Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja	20 %		8.909,300	0	
4.02.4.02.01.01.12.01-P	Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	Dokumen Rencana Kerja Tahun 2019 dan Renja Perubahan tahun 2018	2 dokumen	Lingkup Kabupaten	2.474,000	2.474,000	Dokumen Rencana Kerja Tahun 2019 dan Renja Perubahan tahun 2018	2 dokumen	Lingkup Kabupaten	2.474,000	0	Tetap
4.02.4.02.01.01.12.02-P	Penyusunan laporan keuangan	Laporan keuangan semester dan tahunan	2 dokumen	Lingkup Kabupaten	2.916,900	2.916,900	Laporan keuangan semester dan tahunan	2 dokumen	Lingkup Kabupaten	2.916,900	0	Tetap
4.02.4.02.01.01.12.03-P	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan dan triwulanan LKjP, laporan tahunan, laporan SPIP dan profil kinerja SKPD	21 dokumen	Lingkup Kabupaten	3.518,400	3.518,400	Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan dan triwulanan LKjP, laporan tahunan, laporan SPIP dan profil kinerja SKPD	21 dokumen	Lingkup Kabupaten	3.518,400	0	Tetap
4.02.4.02.01.01.14-P	Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD	Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD	20 %		365.527,250	390.527,250	Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD	20 %		500.284,250	109.757,000	
4.02.4.02.01.01.14.01-P	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Tersedianya komputer PC	3 unit	Lingkup Kabupaten	80.663,500	80.663,500	Tersedianya komputer PC	3 unit	Lingkup Kabupaten	190.420,500	109.757,000	Penyesuaian kebutuhan sarana prasarana kerja
		Tersedianya printer	3 unit				Tersedianya printer	3 unit				
		Tersedianya UPS	3 unit				Tersedianya UPS	3 unit				
		Tersedianya laptop	2 unit				Tersedianya laptop	2 unit				
							Tersedianya mebelair	68 unit				
4.02.4.02.01.01.14.02-P	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Terpeliharanya kendaraan roda 4	4 unit	Lingkup Kabupaten	245.128,750	270.128,750	Terpeliharanya kendaraan roda 4	4 unit	Lingkup Kabupaten	270.128,750	0	Penyesuaian kebutuhan anggaran

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SESUDAH PERUBAHAN				BERTAMBAH BERKURANG	KETERANGAN
		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	LOKASI	RKPD	APBD	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF		
		Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik, alat dan bahan kebersihan	12 bulan				Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik, alat dan bahan kebersihan	12 bulan				
		Pembayaran air, listrik dan telepon kendaraan roda 2	12 bulan				Pembayaran air, listrik dan telepon kendaraan roda 2	12 bulan				
			11 unit					11 unit				
		AC	2 unit				AC	2 unit				
		Mesin ketik	4 unit				Mesin ketik	4 unit				
		Komputer	4 unit				Komputer	4 unit				
		Laptop	2 unit				Laptop	2 unit				
		Printer	3 unit				Printer	3 unit				
4.02.4.02.01.01.14.03-P	Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit	Penetapan Penilaian Angka Kredit	2 semester	Lingkup Kabupaten	19.935.000	19.935.000	Penetapan Penilaian Angka Kredit	2 semester	Lingkup Kabupaten	19.935.000	0	Tetap
4.02.4.02.01.01.14.04-P	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Teririmnya peserta diklat/bimtek/kursus	6 orang	Lingkup Kabupaten	19.800.000	19.800.000	Teririmnya peserta diklat/bimtek/kursus	6 orang	Lingkup Kabupaten	19.800.000	0	Tetap
4.02.4.02.01.01.57-P	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Cakupan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengawasan desa	62,44 %		1.178.017.900	1.235.891.400	Cakupan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengawasan desa	62,44 %		1.269.240.400	33.348.000	
4.02.4.02.01.01.57.16-P	Peningkatan Kapabilitas APIP ( Internal Audit Capability Models )	Terwujudnya kapabilitas APIP	3 level	Lingkup Kabupaten	89.626.800	89.626.800	Terwujudnya kapabilitas APIP	3 level	Lingkup Kabupaten	89.626.800	0	Tetap
		Terwujudnya peningkatan pengelolaan data pengawasan	12 bulan				Terwujudnya peningkatan pengelolaan data pengawasan	12 bulan				
		Terselenggaranya Program Peningkatan Pelatihan Mandiri	12 bulan				Terselenggaranya Program Peningkatan Pelatihan Mandiri	12 bulan				
4.02.4.02.01.01.57.18-P	Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Laporan hasil review dokumen laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah	2 jenis	Lingkup Kabupaten	108.534.600	108.534.600	Laporan hasil review dokumen laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah	2 jenis	Lingkup Kabupaten	108.534.600	0	Tetap
		Review RKA SKPD	40 SKPD				Review RKA SKPD	40 SKPD				
		Laporan Hasil Pelaksanaan PMPRB	1 dokumen				Laporan Hasil Pelaksanaan PMPRB	1 dokumen				
4.02.4.02.01.01.57.14-P	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Laporan hasil pemeriksaan reguler	40 SKPD	Lingkup Kabupaten	172.740.850	172.740.850	Laporan hasil pemeriksaan reguler	40 SKPD	Lingkup Kabupaten	172.735.850	-5.000	Penyesuaian kebutuhan anggaran perjalanan dinas
4.02.4.02.01.01.57.13-P	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan khusus / kasus	Laporan Pemeriksaan khusus/kasus	5 dokumen	Lingkup Kabupaten	64.921.300	64.921.300	Laporan Pemeriksaan khusus/kasus	5 dokumen	Lingkup Kabupaten	83.221.300	18.300.000	Penyesuaian anggaran Tim Pemeriksa terkait penambahan jumlah Obyek Pemeriksaan
		Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	5 dokumen				Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	5 dokumen				
4.02.4.02.01.01.57.05-P	Tindak lanjut hasil pemeriksaan	Penyelenggaraan Gelar Pengawasan Daerah	1 kali	Lingkup Kabupaten	83.982.050	83.982.050	Penyelenggaraan Gelar Pengawasan Daerah	1 kali	Lingkup Kabupaten	83.982.050	0	Tetap
		Rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	2 jenis				Rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	2 jenis				
4.02.4.02.01.01.57.01-P	Pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Laporan hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa	87 dokumen	Lingkup Kabupaten	319.924.800	396.378.300	Laporan hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa	87 dokumen	Lingkup Kabupaten	396.332.300	-46.000	Penyesuaian kebutuhan anggaran perjalanan dinas



NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SESUDAH PERUBAHAN				BERTAMBAH BERKURANG	KERANJAN
		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	LOKASI	RKPD	APBD	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF		
		Laporan hasil pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa	18 dokumen				Laporan hasil pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa	18 dokumen				
4.02.4.02.01.01.57.19-P	Pendampingan Pengelolaan Aset Daerah	Laporan hasil stock opname dan cash opname	42 SKPD	Lingkup Kabupaten	37,600,800	37,600,800	Laporan hasil stock opname dan cash opname	42 SKPD	Lingkup Kabupaten	37,600,800	0	Tetap
4.02.4.02.01.01.57.20-P	Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Laporan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	4 dokumen	Lingkup Kabupaten	300,686,700	282,106,700	Laporan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	4 dokumen	Lingkup Kabupaten	297,206,700	15,100,000	Penyesuaian Jumlah anggota tim dalam pelaksanaan Rencana Aksi pencegahan Korupsi Tintegrasi
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan RAD PPK	1 dokumen				Tersedianya Laporan Pelaksanaan RAD PPK	1 dokumen				
		Terwujudnya penetapan dan pendampingan SKPD percontohan zona integritas	4 SKPD				Terwujudnya penetapan dan pendampingan SKPD percontohan zona integritas	4 SKPD				
		Meningkatnya tingkat kepatuhan dalam penyampaian LHKASN	42 SKPD				Meningkatnya tingkat kepatuhan dalam penyampaian LHKASN	42 SKPD				
		Review AKIP Pamkab dan evaluasi AKIP SKPD	42 SKPD				Review AKIP Pamkab dan evaluasi AKIP SKPD	42 SKPD				
		Evaluasi SPIP	20 SKPD				Evaluasi SPIP	20 SKPD				
		Operasi Tangkap Tangan Saber Pungli	10 kali				Operasi Tangkap Tangan Saber Pungli	10 kali				
<b>Jumlah</b>										1,956,828,950	143,106,000	

## BAB IV PENUTUP


Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu rencana tidak hanya pada proses perumusannya saja namun banyak dipengaruhi oleh implementasinya yang tidak jarang memerlukan campur tangan pimpinan puncak. Hal lain adalah pencermatan terhadap kemungkinan perubahan-perubahan lingkungan sebagai langkah untuk melakukan prediksi untuk perbaikan serta kemauan dan dukungan seluruh staf untuk melaksanakan komitmen yang telah disepakati tersebut. Untuk itu, apabila pada tahun berjalan ternyata diperlukan perubahan, maka akan diupayakan tidak menyimpang dari Renja yang telah disusun.

Dalam penyusunan Perubahan Kedua Rencana kerja Tahun 2018 ini telah diupayakan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok Inspektorat Daerah.

Kami berharap agar Perubahan Kedua Renja ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penetapan perubahan anggaran program dan kegiatan yang benar-benar menggambarkan anggaran yang berbasis kinerja.

Wates, Agustus 2018

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO



*[Handwritten Signature]*

**Drs. RIYADI SUNARTO**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP.19671018 199303 1 004